

ABSTRACT

The efforts of the Yogyakarta Special Region government in handling the problem of processing sludge is by building a Sewage Treatment Plant in Sewon, Bantul. Sewon Sewage Treatment Plant is working with the private sector and the government related to sludge removal services. But from the data obtained in the government-owned stool truck field it is very minimal to conduct flushing at the Sewon Sludge Treatment Plant. Therefore, it is necessary to evaluate the services of sludge transportation for government services to find out the problems and provide recommendations for transportation services to the local government. The study was conducted at the Public Works Department of Bantul Regency with data collection in the field and interviews. Interviews were carried out on operators of sludge transport services owned by the Public Works Office of Bantul Regency with the EHRA Modification method. The analysis was carried out on the problems in the field. Based on the analysis of the problem of transporting the sludge belonging to the Public Works Department of Bantul Regency, the lack of fleet and lack of promotion to the public so that the demand for transportation of sludge transport services is minimal. There needs to be an additional fleet and increased promotion to the community, and an understanding of the Operational Standards Procedure for the method of desludging in septic tanks and / or Communal Wastewater Treatment Plants. When compared with the standards according to the Ministry of Public Works and Public Housing Number 4 of 2017, it is necessary to use Personal Protective Equipment that is standard in desludging activities and must carry out desludging until there is no mud left in the septic tank.

Keywords: Septic tank, feces truck, Communal Wastewater Treatment Plants, technical problems.

ABSTRAK

Upaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani permasalahan pengolahan lumpur tinja yaitu dengan membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Sewon, Bantul. IPLT Sewon bekerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah terkait pelayanan penyedotan lumpur tinja. Tetapi dari data yang didapatkan di lapangan truk tinja milik pemerintah sangat minim untuk melakukan penggelontoran di IPLT Sewon. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mengenai layanan pengangkutan lumpur tinja layanan pemerintah untuk mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi layanan pengangkutan pada pihak pemerintah setempat. Penelitian dilakukan di Dinas PUPKP Kab.Bantul dengan pengambilan data dilapangan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap operator layanan pengangkutan lumpur tinja milik Dinas PUPKP Kab.Bantul dengan metode EHRA Modifikasi. Analisis dilakukan pada permasalahan yang ada dilapangan. Berdasarkan analisis permasalahan pada pengangkutan lumpur tinja milik Dinas PUPKP yaitu kurangnya armada dan kurangnya promosi kepada masyarakat sehingga permintaan masyarakat terhadap layanan pengangkutan lumpur tinja sangat minim. Perlu adanya penambahan armada serta peningkatan promosi kepada masyarakat, dan pemahaman mengenai SOP cara penyedotan lumpur tinja di tangki septik dan/atau IPAL Komunal. Apabila dibandingkan dengan standar menurut PerMen PUPR No.4 Tahun 2017, maka harus menggunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai standar dalam kegiatan penyedotan dan harus melakukan penyedotan lumpur tinja sampai tidak ada lumpur yang tersisa di tangki septik.

Kata kunci: Tangki Septik, truk tinja, IPAL komunal, permasalahan teknis